



**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) PADA KANTOR OJK REGIONAL 8 BALI DAN NUSA TENGGARA**

*The Role of The Financial Services Authority (OJK) On The Financial Information Services System (SLIK) At The OJK Regional Offices 8 Bali And Nusa Tenggara*

**I Gede Andika Yudiana<sup>1</sup>, Ni Wayan Suartini<sup>2</sup>, I Nyoman Gede Supraptha<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mahendradatta

**Email: gdandika7@gmail.com**

**Abstract**

*OJK is still not serious about monitoring potential reporting delays and errors in data input, as evidenced by the number of non-performing loans due to delays and inaccuracies in inputting SLIK data in Bali. The purpose of this study is to be able to examine the influence of the Role of the Financial Services Authority (OJK) on the Financial Information Service System (SLIK) at the OJK Regional 8 Bali Office in Nusa Tenggara. After conducting a literature review and hypothesis preparation, the data were collected through questionnaires on all employees of the OJK Regional 8 Bali and Nusa Tenggara Offices. Afterward, an analysis of the data obtained using multiple regression analysis was carried out. This analysis includes classical assumption tests, multiple regression analysis, hypothesis testing through t and F tests, and coefficient of determination (R<sup>2</sup>) analysis. The results of the tests conducted showed that the Financial Services Authority variable (X1) had no significant effect and the Financial Services Authority Standard Operating Procedure variable (X2) had a significant effect on the Supervision of the Financial Information Service System (Y) Report. The results of this study are expected to enrich related theories and provide benefits to the community and input or consideration for the OJK in carrying out its duties.*

**Keywords:** OJK, SLIK, SOP

**Abstrak**

OJK masih belum serius dalam mengawasi potensi keterlambatan pelaporan maupun kesalahan dalam penginputan data, dibuktikan dengan angka kredit bermasalah akibat keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penginputan data SLIK di Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menelaah pengaruh Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Kantor OJK Regional 8 Bali di Nusa Tenggara. Setelah melakukan kajian literatur dan penyusunan hipotesis, data yang dikumpulkan melalui kuisioner pada seluruh pegawai Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian dilakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini mencakup, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan F, dan analisis koefisien

determinasi (R2). Hasil uji yang dilakukan menunjukkan variabel Otoritas Jasa Keuangan (X1) tidak berpengaruh signifikan dan variabel Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori terkait dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan masukan dan/atau pertimbangan bagi OJK dalam menjalankan tugasnya.

**Kata Kunci:** OJK, SLIK, SOP

## PENDAHULUAN

OJK telah mengambil alih seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang tersebar di Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disingkat Bapepam-LK) (Lestari, 2012). Untuk menjalankan kewenangan pengawasan serta fungsinya sebagai *Public Credit Registry*, pada Kamis, 27 April 2017 Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK adalah sistem informasi yang juga digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk bertukar informasi mengenai kualitas calon debitur tetapi SLIK mempunyai akses informasi yang lebih luas dan lebih dalam. SLIK diluncurkan agar OJK dapat memantau data perkreditan dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat, sehingga tugas OJK dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan menjadi lebih fokus dan optimal (Usman, 2021). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di Kantor OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara, perkembangan jumlah pelapor SLIK jenis BPR Konvensional menurut data statistik pada bulan Januari 2019 telah mencapai 15.983, sedangkan jumlah permintaan informasi debitur telah mencapai 873.179 permintaan (OJK, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka efektivitas terkait pengawasan OJK masih kurang.

Faktor yang mempengaruhi kurangnya pengawasan OJK antara lain, 50% Staff OJK merupakan staff BI, beberapa BPR terlambat dan menyampaikan laporan SLIK yang tidak akurat walaupun OJK sudah menerapkan aturan dan sanksi (Sintha, 2017). OJK belum serius dalam mengawasi potensi keterlambatan pelaporan maupun kesalahan dalam penginputan data, dibuktikan dengan angka kredit bermasalah akibat keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penginputan data SLIK di Bali. Berdasarkan pada latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada Kantor OJK Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara. Adapun tujuannya, adalah untuk mengetahui peran OJK dalam pengawasan laporan SLIK, untuk mengetahui SOP OJK dalam SLIK, serta untuk mengetahui hubungan peran dan SOP dalam pengawasan laporan terhadap SLIK.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner, observasi, wawancara terstruktur. Perencanaan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Jl. WR Supratman No. 1 Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Bali pada bulan Juni 2022. Sampel dalam penelitian ini menggunakan pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara yang berjumlah 65 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei berupa penyebaran kuesioner secara langsung kepada pegawai Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Uji Instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil analisis data diperoleh menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini mencakup, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan F, dan analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang telah didapatkan pada penelitian ini telah lolos uji statistic diantaranya: Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji Asumsi Klasik (Uji Nomrmalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas). Sehingga, data yang digunakan telah teruji sesuai serta dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan.

Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu pengaruh Otoritas Jasa Keuangan ( $X_1$ ), Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan ( $X_2$ ) dan terhadap Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan ( $Y$ ). Berdasarkan uji regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan struktur sebagai berikut:

$$Y = 6,678 + 0,089 + 0,637$$

1. Konstanta sebesar 6,678 dengan asumsi bahwa tanpa ditambahkan variabel Otoritas Jasa Keuangan ( $X_1$ ), Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan ( $X_2$ ) maka nilai Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan ( $Y$ ) bernilai sebesar 4,265 satuan.
2. Nilai koefisien Otoritas Jasa Keuangan ( $X_1$ ) sebesar 0,089. Jika terjadi perubahan sebesar satu satuan, maka menyebabkan peningkatan Kinerja keuangan sebesar 0,089 satuan. Dimana asumsi dasarnya variabel Otoritas Jasa Keuangan ( $X_1$ ) tetap.
3. Nilai koefisien Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan ( $X_2$ ) sebesar 0,637. Jika terjadi perubahan sebesar satu satuan, maka menyebabkan peningkatan Kinerja keuangan sebesar 0,637 satuan. Dimana asumsi dasarnya variabel Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan ( $X_2$ ) tetap.

Uji Hipotesis dilakukan melalui Uji parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji F). Hasil Uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa (1) Nilai signifikan variabel Otoritas Jasa Keuangan ( $X_1$ ) sebesar 0,396 lebih besar dari 0,05 ( $0,396 > 0,05$ ), maka variabel bebas Otoritas Jasa Keuangan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan secara

parsial terhadap variabel terikat Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y). (2) Nilai signifikan variable Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2) sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ), maka variabel bebas Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y).

Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $26,741 > F$ . Dapat disimpulkan bahwa H3 (Hipotesis 3) diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi (R Square) sebesar 0,455 mempunyai arti bahwa sebesar 44,6% variabel terikat Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y) dipengaruhi oleh Kinerja Otoritas Jasa Keuangan (X1) dan Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2), sedangkan sisanya sebesar 55,4% dijelaskan oleh faktor - faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Penelitian ini hanya meneliti terkait Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara sehingga tidak bisa memberikan hasil untuk menggambarkan keadaan Otoritas Jasa Keuangan (X1) dan Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2) terhadap Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y) di Seluruh Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Otoritas Jasa Keuangan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y) dikarenakan apabila Otoritas Jasa. Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y). Otoritas Jasa Keuangan (X1) dan Standar Operasional Prosedur Otoritas Jasa Keuangan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Y).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lestari H.D. (2012). Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Mengeal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan.
- Purwanti, S. (2019). Pengaruh Sistem Informasi dan Akuntansi Terhadap Pengendalian Internal dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penggajian di KANTOR PUSAT UNIVERSITAS PASUNDAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 19(2), 5–24.
- Sintha N. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa



Keuangan Pada Bank Perkreditan Di Kota Denpasar. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*. Vol 10.

Sumarna, A., & Suparman, A. (2020). Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Pada Pt. Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak. *The World of Financial Administration Journal*, 1(2), 119–135. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v1i2.761>.

Usman. (2021). POJK dan SEOJK Pelaporan dan Permintaan Informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan. Vol 3:1–11.

